

Digitalisasi Desa melalui Pengembangan Website sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Tengah

Adventus Tangkasiang Senas¹, Ridho Dyan Alvionta², Kristiana Novarin³, Sinta Rulia Rahmadani⁴, Khoirul Aris Setiawan⁵, May Camaro Putra⁶, Aurora Cintauri⁷, Pancar⁸, Anis Wulandari⁹, Tri Mariana¹⁰, Oktavia Ramadhani¹¹, Averilin Jesti¹², Tuti Arlina Gea¹³, Purada Riska Uli Lumban Raja¹⁴, Evaritus Ampu¹⁵, Wahyu Widyawati¹⁶

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email: adventustangkasiang@mhs.eng.upr.ac.id¹, ridhoalvionta@gmail.com², novarinkristiana2@gmail.com³, shisinlia@gmail.com⁴, arissetiawan2425@gmail.com⁵, maycamaroputra@gmail.com⁶, auroracintauri999@gmail.com⁷, pcar57282@gmail.com⁸, aniswulandari002@gmail.com⁹, azzputri67@gmail.com¹⁰, , oktaviaramadhani973@gmail.com¹¹, averilinjesti617@gmail.com¹², tutiarlinagea01@gmail.com¹³, puradanainggolan83@gmail.com¹⁴, evaritusampu@gmail.com¹⁵, widyawatiwahyu@agr.upr.ac.id¹⁶

Correspondence : auroracintauri999@gmail.com*

Abstract: This service program aimed to develop the Bajuh Village website as a digital information platform and to equip village officials to manage it independently. The activity applied the Asset-Based Community Development (ABCD) approach through the Discovery, Dream, Design, Define, and Deliver cycle, involving village officials and the community as the assisted group. Results show that an official website was developed with eight main menus: Home, Village Profile, Village Officials, News, Village Budget, Complaints, Letter Requests, and Village Gallery. The Village Budget menu supports financial transparency, while the Complaints and Letter Request menus provide online administrative services, indicating the program has moved from a purely informational site toward digitalizing village public services. Village officials were able to manage basic content, though further mentoring is still needed for technical features. The ABCD approach proved effective in driving the success and sustainability of an informative, transparent, and functional village service digitalization.

Abstrak : Program pengabdian ini bertujuan mengembangkan website Desa Bajuh sebagai media informasi digital sekaligus membekali perangkat desa dalam mengelolanya secara mandiri. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) melalui siklus Discovery, Dream, Design, Define, dan Deliver, melibatkan perangkat desa dan masyarakat sebagai kelompok dampingan. Hasil pengabdian menunjukkan telah terbentuk website resmi dengan delapan menu utama: Beranda, Profil Desa, Perangkat Desa, Berita, APB Desa, Pengaduan, Pengajuan Surat, dan Galeri Desa. Menu APB Desa mendukung transparansi keuangan, sementara menu Pengaduan dan Pengajuan Surat menghadirkan layanan administrasi daring, menandakan program ini telah bergerak dari sekadar media informasi menuju digitalisasi layanan publik desa. Perangkat desa mampu mengelola konten dasar website, meski masih memerlukan pendampingan lanjutan untuk fitur teknis. Pendekatan ABCD terbukti efektif mendorong keberhasilan dan keberlanjutan digitalisasi layanan desa yang informatif, transparan, dan fungsional.

Keywords : Digitalisasi Desa, Website Desa, Pelayanan Desa

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, untuk bertransformasi ke arah digital. Transformasi ini tidak hanya

berlangsung di tingkat pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga mulai menyentuh unit pemerintahan terkecil, yaitu desa. Pemanfaatan website desa sebagai media informasi telah terbukti berperan penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan pengawasan pembangunan desa (Rizal et al., 2023). Dalam skala global, kajian mengenai *digital villages* juga menunjukkan bahwa pengembangan desa digital berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah pedesaan, mencakup akses informasi, layanan administrasi, hingga promosi potensi local (Yanti et al., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa transformasi digital di wilayah rural mampu mendorong pemerintahan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud di sebagian besar desa di Indonesia. Banyak pemerintah desa yang masih mengelola dan menyampaikan informasi secara konvensional, seperti melalui papan pengumuman, penyebaran informasi secara lisan, atau dokumen fisik yang sulit diakses secara luas dan berkelanjutan oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan sejumlah permasalahan, di antaranya keterlambatan penyampaian informasi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan data dan kegiatan desa (Dana et al., 2025). Kesenjangan digital semacam ini turut menjadi tantangan tersendiri, sebab tanpa adanya media informasi yang terstruktur, masyarakat kesulitan memperoleh data yang akurat mengenai profil, pemerintahan, maupun program-program yang sedang berjalan di desa mereka (Isadi et al., 2026).

Permasalahan tersebut turut dialami oleh Desa Bajuh, yang hingga saat ini belum memiliki media digital resmi untuk menyampaikan informasi mengenai profil desa, sejarah, visi dan misi, struktur pemerintahan, data kependudukan, sarana dan prasarana, maupun dokumentasi kegiatan desa secara terstruktur dan mudah diakses. Padahal, ketersediaan sistem informasi berbasis website telah terbukti mampu meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan desa sekaligus mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan akurat (Heryanto Kawisen et al., 2026). Digitalisasi pemerintahan desa melalui website juga sejalan dengan prinsip good governance, yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kodriyah & Vidiati, 2025).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) menginisiasi program kerja utama berupa Digitalisasi Desa Bajuh melalui pengembangan website resmi desa sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk: (1) membantu Pemerintah Desa Bajuh dalam menyediakan media informasi digital yang memuat profil, sejarah, visi dan misi, pemerintahan, data kependudukan, sarana dan prasarana, berita dan kegiatan, dokumentasi, serta layanan dan kontak desa; (2) meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi

masyarakat; serta (3) membekali perangkat desa dengan kemampuan mengelola dan memperbarui website

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas. Metode pelaksanaan program meliputi pendampingan dan pelatihan, yang mencakup penyampaian materi serta panduan praktis dalam mengoperasikan dan mengelola website desa sebagai media informasi berbasis digital. Tahapan pelaksanaan program ini dirancang untuk memastikan perangkat desa dan masyarakat memahami manfaat serta langkah-langkah dalam penerapan digitalisasi desa, dengan menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang menitikberatkan pada pemanfaatan aset dan potensi yang telah dimiliki desa, alih-alih berfokus pada kekurangan yang ada (Kretzmann & McKnight, 1993).

Tahapan persiapan untuk program Digitalisasi Desa Bajuh diawali dengan analisis situasi menggunakan tahap *Discovery* dalam kerangka ABCD. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset dan potensi yang dimiliki desa, seperti data kependudukan dan pemerintahan yang sudah tersusun secara administratif, dokumentasi kegiatan desa yang cukup lengkap, serta kesediaan perangkat desa untuk mendukung program berbasis teknologi. Di sisi lain, teridentifikasi pula sejumlah kendala, seperti belum tersedianya media informasi digital resmi, terbatasnya kemampuan teknis perangkat desa dalam mengelola sistem berbasis website, serta kebiasaan penyampaian informasi yang masih dilakukan secara konvensional. Kondisi ini menjadi dasar bagi tim KKN dan perangkat desa untuk merumuskan gambaran ideal (*Dream*) mengenai website desa yang akan dikembangkan.

Selain itu, dilakukan pula identifikasi kebutuhan teknis, seperti perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk pengembangan dan pengoperasian website, serta ketersediaan akses internet sebagai infrastruktur pendukung. Koordinasi dengan Kepala Desa dan perangkat desa dilakukan untuk menyusun rencana kerja secara terperinci, mencakup jadwal pelaksanaan, pembagian tugas antara tim KKN dan kelompok dampingan, serta indikator keberhasilan program. Pelatihan bagi perangkat desa menjadi prioritas untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola konten dan sistem website secara mandiri.

Program ini dimulai dengan tahap persiapan yang mencakup koordinasi dengan perangkat desa untuk memastikan kesiapan teknis dan sumber daya, pengumpulan data profil, sejarah, visi dan misi, serta data kependudukan dan sarana prasarana desa, sekaligus perancangan struktur dan tampilan website (*Design*). Selanjutnya dilakukan sosialisasi berupa edukasi kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai manfaat digitalisasi desa serta penyampaian informasi terkait rencana pengembangan website. Tahap berikutnya adalah pelatihan perangkat desa yang meliputi pelatihan

teknis penginputan data, pengunggahan berita dan dokumentasi, serta simulasi pengelolaan konten website secara langsung (*Define*). Setelah itu dilakukan implementasi sistem melalui penginputan data ke dalam website, pengujian kelayakan sistem, serta pendampingan teknis kepada perangkat desa pada masa awal penggunaan (*Deliver*). Tahap akhir meliputi evaluasi dan monitoring, yaitu diskusi bersama perangkat desa untuk menilai kesiapan pengelolaan website secara mandiri serta menampung masukan guna penyempurnaan sistem sesuai kebutuhan desa.

Rencana keberlanjutan program Digitalisasi Desa Bajuh bertujuan untuk memastikan manfaat program ini tetap dirasakan dalam jangka panjang. Keberlanjutan dimulai dengan penguatan kapasitas perangkat desa melalui pendampingan pengelolaan website yang telah dilakukan selama pelaksanaan program, yang diharapkan dapat dilanjutkan secara mandiri dan berkala oleh Sekretaris Desa serta staf administrasi yang telah dilatih. Selain itu, pembaruan konten dan data desa direncanakan dilakukan secara rutin agar informasi yang ditampilkan tetap relevan dan akurat, sehingga website Desa Bajuh dapat terus berfungsi sebagai media informasi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah desa dalam jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum pelaksanaan program, penyampaian informasi di Desa Bajuh masih dilakukan secara konvensional, yaitu melalui papan pengumuman di kantor desa, penyampaian secara lisan dalam forum musyawarah, serta dokumen fisik yang tersimpan di kantor desa. Kondisi ini menyebabkan informasi mengenai profil, pemerintahan, keuangan, hingga layanan administrasi desa sulit diakses oleh masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor desa. Di sisi lain, Desa Bajuh memiliki sejumlah aset yang dapat dioptimalkan, seperti data kependudukan dan pemerintahan yang sudah tersusun secara administratif, dokumentasi kegiatan desa yang cukup lengkap, data Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang sudah tersedia, serta kesediaan perangkat desa untuk mendukung program berbasis teknologi. Potensi inilah yang menjadi titik tolak pada tahap *Discovery* dalam pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), sekaligus menjadi dasar bagi tim KKN untuk merancang langkah pendampingan selanjutnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, tahap awal pendampingan diawali dengan membangun komunikasi dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat melalui audiensi untuk memperkenalkan program Digitalisasi Desa Bajuh sekaligus menggali kebutuhan pemerintah desa terhadap media informasi digital. Komunikasi awal ini penting dilakukan mengingat tingkat penerimaan dan dukungan aparatur desa sejak awal program turut memengaruhi keberhasilan digitalisasi desa (Isadi et al., 2026). Dari hasil komunikasi tersebut, tim KKN bersama perangkat desa membentuk kelompok dampingan yang terdiri atas Sekretaris Desa dan staf administrasi sebagai calon pengelola *website*, serta

perwakilan pemuda/karang taruna desa yang tertarik pada bidang teknologi informasi, guna memastikan keberlanjutan pengelolaan *website* setelah program KKN berakhir.

Dengan kelompok dampingan yang telah terbentuk, pelaksanaan pendampingan kemudian dilakukan secara bertahap, dimulai dari perumusan kebutuhan dan rancangan tampilan *website* (*Dream* dan *Design*), pengumpulan data, hingga penginputan konten ke dalam sistem (*Define* dan *Deliver*). Melalui tahapan tersebut, dikembangkan *website* resmi Desa Bajuh dengan delapan menu utama, yaitu Beranda, Profil Desa, Perangkat Desa, Berita, APB Desa, Pengaduan, Pengajuan Surat, dan Galeri Desa. Menu Profil Desa dan Perangkat Desa memuat informasi sejarah, visi dan misi, serta struktur pemerintahan dan data kependudukan; menu Berita dan Galeri Desa berfungsi sebagai media publikasi kegiatan dan dokumentasi desa; menu APB Desa menyajikan informasi anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan; sementara menu Pengaduan dan Pengajuan Surat merupakan fitur layanan interaktif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan serta mengajukan permohonan surat administrasi secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Proses pengembangan ini dilakukan dengan metode *learning by doing*, di mana kelompok dampingan tidak hanya diberikan penjelasan teoretis, tetapi juga dilibatkan langsung dalam praktik pengoperasian sistem, seperti menambahkan berita, mengunggah dokumentasi ke Galeri Desa, memperbarui data APB Desa, serta menguji alur kerja menu Pengaduan dan Pengajuan Surat. Pendekatan partisipatif semacam ini sejalan dengan prinsip ABCD yang menempatkan masyarakat dan aparatur desa sebagai pelaku aktif, bukan sekadar penerima manfaat (Kretzmann & McKnight, 1993).

Setelah *website* selesai dikembangkan, evaluasi dilakukan melalui diskusi bersama perangkat desa untuk menilai kesiapan sistem serta kesiapan pengelola dalam mengoperasikannya secara mandiri. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kelompok dampingan mampu memahami alur dasar pengelolaan konten, seperti memperbarui berita dan galeri, namun masih memerlukan pendampingan lanjutan untuk pengelolaan fitur yang lebih teknis, seperti verifikasi data pada menu Pengaduan dan Pengajuan Surat, serta pembaruan data APB Desa secara berkala. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa tantangan utama pascaimplementasi sistem informasi desa umumnya bukan terletak pada aspek teknologi, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia dan keberlanjutan pendampingan (Aidin, 2025).

Bila dibandingkan dengan temuan pada Desa Tuk, di mana transparansi digital masih terbatas akibat rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan konten dan minimnya literasi digital masyarakat (Kodriyah & Vidiati, 2025), pengembangan *website* Desa Bajuh menunjukkan kemajuan yang relatif lebih baik pada tahap awal, terutama karena keterlibatan aktif Sekretaris Desa, staf administrasi, dan perwakilan pemuda sejak fase Discovery. Namun demikian, tantangan serupa berpotensi muncul pada Desa Bajuh apabila pendampingan tidak dilanjutkan secara berkala, mengingat

kelompok dampingan baru menguasai pengelolaan konten dasar dan belum sepenuhnya mandiri dalam menangani fitur teknis seperti verifikasi Pengaduan dan pembaruan APB Desa. Kondisi ini sejalan dengan pengalaman Desa Bi'ih, yang menegaskan bahwa keberlanjutan digitalisasi desa sangat ditentukan oleh tingkat kepemilikan dan keterlibatan masyarakat terhadap program, bukan semata-mata ketersediaan infrastruktur teknologi (Artamevia et al., 2025).

Dari sisi tantangan pelaksanaan, keterbatasan akses internet yang stabil serta minimnya pengalaman perangkat desa dalam mengoperasikan sistem berbasis website menjadi kendala yang turut memperlambat proses alih kelola. Hal ini memperkuat temuan bahwa hambatan utama digitalisasi desa umumnya bersifat non-teknis, yakni terkait kesiapan sumber daya manusia dan konsistensi pendampingan pascaprogram, dibandingkan hambatan pada sisi teknologi itu sendiri (Aidin, 2025). Sebagai perbandingan, pengembangan SIPEDES di Desa Pancaroba menunjukkan bahwa fitur pengaduan berbasis website dapat diterima baik oleh masyarakat apabila disertai sosialisasi dan pengujian fungsionalitas yang memadai (Heryanto Kawisen et al., 2026); prinsip serupa diterapkan pada uji coba alur kerja menu Pengaduan dan Pengajuan Surat di Desa Bajuh sebelum website diserahkan kepada perangkat desa. Dengan demikian, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan website, tetapi juga dari terbentuknya kesadaran perangkat desa akan pentingnya pembaruan data secara rutin sebagai bagian dari komitmen good governance dan percepatan layanan pemerintahan kepada warga (Damanik et al., 2026).

Secara keseluruhan, program pendampingan ini berhasil menghadirkan *website* resmi Desa Bajuh yang mencakup layanan informasi (Beranda, Profil Desa, Perangkat Desa, Berita, Galeri Desa), layanan transparansi keuangan (APB Desa), serta layanan administrasi interaktif (Pengaduan dan Pengajuan Surat). Keberadaan fitur Pengaduan dan Pengajuan Surat menunjukkan bahwa program ini telah melampaui fungsi *website* sebagai media informasi semata, dan mulai bergerak ke arah digitalisasi layanan publik desa, sejalan dengan salah satu arah prioritas digitalisasi desa yang menekankan percepatan layanan pemerintahan kepada warga (Damanik et al., 2026). Sementara itu, ketersediaan menu APB Desa turut mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain produk berupa *website*, hasil non-fisik yang diperoleh dari program ini adalah peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengoperasikan dan mengelola media digital secara mandiri. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan ABCD yang menitikberatkan pada penguatan aset dan partisipasi aktif masyarakat mampu mendorong keberlanjutan program digitalisasi desa yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga fungsional dan interaktif, sejalan dengan temuan bahwa keberlanjutan inovasi digital di tingkat desa sangat bergantung pada tingkat keterlibatan dan kepemilikan masyarakat terhadap program tersebut (Artamevia et al., 2025).

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan Digitalisasi Desa Bajuh menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi dan layanan publik di tingkat desa dapat diatasi secara efektif melalui pendekatan yang berbasis pada penguatan aset dan partisipasi aktif masyarakat, bukan semata-mata pada penyediaan teknologi. Pendampingan yang dilakukan sejak tahap membangun komunikasi, membentuk kelompok dampingan, hingga transfer kemampuan pengelolaan sistem kepada perangkat desa terbukti mampu menghasilkan produk digital yang tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana layanan administratif dan transparansi keuangan yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Lebih dari sekadar menghasilkan sebuah *website*, kegiatan ini pada dasarnya merupakan proses penguatan kapasitas dan kemandirian Desa Bajuh dalam beradaptasi dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan berorientasi digital. Keterlibatan aktif perangkat desa sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi kunci utama yang membedakan program ini dari sekadar bantuan teknis sesaat, karena keberlanjutannya bergantung pada rasa kepemilikan dan kesiapan sumber daya manusia lokal, bukan pada keberadaan aplikasi semata. Program ini menegaskan bahwa digitalisasi desa merupakan proses bertahap yang menuntut kesinambungan, bukan kegiatan yang selesai begitu sistem selesai dibangun. Oleh karena itu, dukungan pendampingan lanjutan dari pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun perguruan tinggi, tetap diperlukan agar Desa Bajuh dapat terus mengembangkan layanan digitalnya secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kerja sama sehingga kegiatan pengabdian masyarakat Digitalisasi Desa Bajuh dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih pertama disampaikan kepada LPPM Universitas Palangka Raya, yang telah memfasilitasi pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta memberikan dukungan administratif dan pendanaan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Wahyu Widyawati, S.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan secara berkelanjutan sejak tahap perencanaan hingga penyusunan artikel pengabdian ini. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Bapak Irou, A.Md., selaku Kepala Desa Bajuh, yang telah memberikan izin, dukungan, serta kepercayaan kepada tim KKN untuk melaksanakan program digitalisasi di wilayah Desa Bajuh, serta kepada seluruh perangkat Desa Bajuh, khususnya Sekretaris Desa dan staf administrasi, yang telah aktif terlibat dalam proses pengumpulan data, penginputan konten, hingga pelatihan pengelolaan *website*, sehingga program ini

dapat berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan. Apresiasi juga disampaikan kepada masyarakat Desa Bajuh, yang telah memberikan masukan, dukungan, serta partisipasi aktif selama proses sosialisasi dan pelaksanaan program, serta kepada rekan-rekan mahasiswa Tim KKN Desa Bajuh atas kerja sama, kontribusi, dan kekompakan selama seluruh rangkaian pelaksanaan program pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidin, M. (2025). Transformasi Digital Administrasi Desa Melalui Sistem Informasi Desa: Kajian Pustaka Tentang Faktor Pendukung dan Penghambat. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(8), 1661–1674. <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/1158>
- Artamevia, M., Lubis, M., & Mukti, I. (2025). Pemanfaatan Website Desa sebagai Media Transformasi Digital dalam Layanan Administratif dan Promosi Pariwisata Desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 7(1), 14. <https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.366>
- Damanik, M., Rahmadani, S., Sitorus, H., Mayanda, I. W., & Pane, A. H. (2026). *Digitalisasi Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Website di Desa Lubuk Cuik*. 5(1), 3122–3125.
- Dana, G., Yuniari, N., Raharja, I., Bhaskara, I., Darma, I., & Kumara, I. (2025). Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Website Sebagai Upaya Menuju Smart Village di Desa Peguyangan Kaja. *Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2270>
- Heryanto Kawisen, Deasy Purwaningtias, & Ali Mustopa. (2026). Rancang Bangun SIPEDES (Sistem Informasi Pelayanan Desa) Berbasis Website dengan Fitur Pengaduan dan Infografis untuk Meningkatkan Transparansi Informasi. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer (JUKTISI)*, 5(2), 1552–1559. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v5i2.1388>
- Isadi, M., Bagus, A. K., Arif, A. I., Lailatul, I. W., Faiqotus, E. S., Wahyuningsih, R., Nur, S. A., Nurulila, N. S., Masturia, I., Budiarti, N., Hatus, N. S., Dwi, K. I., Zakiyah, H., Bariroh, W., & Nabila, S. S. (2026). *Pengembangan Website Desa Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akses Informasi Publik*. 6, 831–844.
- Kodriyah, D., & Vidiati, C. (2025). Analisis Dampak Keberadaan Website Desa terhadap Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Desa Tuk. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1148–1155. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3592>
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. Center for Urban Affairs and Policy Research, Neighborhood Innovations Network / ACTA Publications, Evanston, IL.
- Rizal, C., Fachri, B., Eka, M., & Zufria, I. (2023). *Penerapan Spiral Method Dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa Sebagai Keterbukaan Informasi Publik*. 4(2). <https://doi.org/10.47065/josh.v4i2.2960>
- Yanti, O., Gultom, D. S., Irawan, C., Zaadah, S., Saputri, E., & Purwanto, E. (2025). *Digitalisasi Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik di Desa Sungai Baung Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Village*. 5.